

TESIS

KEWENANGAN PENCABUTAN REGULASI PADA KEMENTERIAN TERDAMPAK RESTRUKTURISASI: KAJIAN HUKUM TATA NEGARA TERHADAP KEBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DI INDONESIA

***AUTHORITY TO REVOKE REGULATIONS IN MINISTRIES AFFECTED
BY RESTRUCTURING: A CONSTITUTIONAL LAW ANALYSIS OF THE
VALIDITY OF MINISTERIAL REGULATIONS IN INDONESIA***



Oleh:

RIZKI BIMA ANGGARA

NIM. 2410622002

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

TESIS

**KEWENANGAN PENCABUTAN REGULASI PADA
KEMENTERIAN TERDAMPAK RESTRUKTURISASI: KAJIAN
HUKUM TATA NEGARA TERHADAP KEBERLAKUAN
PERATURAN MENTERI DI INDONESIA**

***AUTHORITY TO REVOKE REGULATIONS IN MINISTRIES
AFFECTED BY RESTRUCTURING: A CONSTITUTIONAL LAW
ANALYSIS OF THE VALIDITY OF MINISTERIAL REGULATIONS
IN INDONESIA***



Oleh:

RIZKI BIMA ANGGARA

NIM. 2410622002

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

HALAMAN JUDUL

KEWENANGAN PENCABUTAN REGULASI PADA KEMENTERIAN TERDAMPAK RESTRUKTURISASI: KAJIAN HUKUM TATA NEGARA TERHADAP KEBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DI INDONESIA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:

RIZKI BIMA ANGGARA

NIM. 2410622002

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Rizki Bima Anggara
NIM : 2410622002
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **“KEWENANGAN PENCABUTAN REGULASI PADA KEMENTERIAN TERDAMPAK RESTRUKTURISASI: KAJIAN HUKUM TATA NEGARA TERHADAP KEBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DI INDONESIA”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, 04 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Rizki Bima Anggara
NIM. 2410622002

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Bima Anggara

NIM : 2410622002

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“KEWENANGAN PENCABUTAN REGULASI PADA KEMENTERIAN TERDAMPAK RESTRUKTURISASI: KAJIAN HUKUM TATA NEGARA TERHADAP KEBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DI INDONESIA”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 04 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Rizki Bima Anggara
NIM. 2410622002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEWENANGAN PENCABUTAN REGULASI PADA KEMENTERIAN TERDAMPAK RESTRUKTURISASI: KAJIAN HUKUM TATA NEGARA TERHADAP KEBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:

RIZKI BIMA ANGGARA

NIM. 2410622002

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal 04 Juni 2026

Menyetujui:

Pembimbing 1



Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
NIP. 195709111983031001

Pembimbing 2



Dr. Irsyaf Marsal, S.H., M.H.
NIP. 196603062024211001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971 , Fax 021-7656904
Laman : hukum.upnvj.ac.id , e-mail: fh@upnvj.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**KEWENANGAN PENCABUTAN REGULASI PADA KEMENTERIAN
TERDAMPAK RESTRUKTURISASI: KAJIAN HUKUM TATA NEGARA
TERHADAP KEBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh:

RIZKI BIMA ANGGARA

NIM. 2410622002

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas

Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Pada Tanggal 07 Juli 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1

Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
NIP. 195709111983031001

Pembimbing 2

Dr. Irsyaf Marsal, S.H., M.H.
NIP. 196603062024211001

Dekan Fakultas Hukum



DEK. Suherman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Koordinator Program Studi
Magister Hukum

Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H., M.H.
NIP. 198910192025211048

ABSTRAK

KEWENANGAN PENCABUTAN REGULASI PADA KEMENTERIAN TERDAMPAK RESTRUKTURISASI: KAJIAN HUKUM TATA NEGARA TERHADAP KEBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DI INDONESIA

Rizki Bima Anggara (2410622002), Wicipto Setiadi, Irsyaf Marsal

Penelitian ini menganalisis dampak restrukturisasi terhadap kedudukan dari peraturan menteri dari kementerian terdampak restrukturisasi dan kewenangan normatif dalam mencabut peraturan menteri dari kementerian terdampak restrukturisasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan pendekatan undang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta konsep-konsep teoritis yang relevan.

Hasil penelitian menemukan bahwa kedudukan peraturan menteri dari kementerian terdampak restrukturisasi dari aspek hieraki norma menyatakan bahwa peraturan menteri dari kementerian terdampak restrukturisasi tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sedangkan dari aspek keberlakuan norma, peraturan menteri dari kementerian terdampak restrukturisasi masih tetap berlaku selama belum dicabut, diubah, diganti, atau dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan atau putusan yang berwenang.

Dalam hal Kementerian dibubarkan dimana tugas dan fungsinya dialihkan bagi kementerian baru, pihak yang berwenang mencabut peraturan menteri terdahulu yaitu Kementerian baru yang melanjutkan tugas dan fungsinya. Namun, jika Kementerian dibubarkan dimana tugas dan fungsinya dialihkan ke dalam organisasi pemerintah berbentuk Badan, pihak yang berwenang mencabut Peraturan Menteri terdahulu yaitu Badan yang menerima peralihan tugas dan fungsi dari Kementerian sebelumnya serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Penulis mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan menambahkan pengaturan mekanisme pencabutan regulasi dari kementerian terdampak restrukturisasi secara umum pada mekanisme pembentukan peraturan presiden yang mengatur organisasi, tugas, dan fungsi dari organ pemerintah supaya pencabutan secara formal melalui Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala Badan hanya sebagai instrumen pengaturan pengganti dalam lingkup kewenangan badan baru.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Kewenangan, Peraturan Menteri.

ABSTRACT

AUTHORITY TO REVOKE REGULATIONS IN MINISTRIES AFFECTED BY RESTRUCTURING: A CONSTITUTIONAL LAW ANALYSIS OF THE VALIDITY OF MINISTERIAL REGULATIONS IN INDONESIA

Rizki Bima Anggara (2410622002), Wicipto Setiadi, Irsyaf Marsal

This study examines the impact of ministerial restructuring on the legal status of ministerial regulations issued by restructured ministries and the normative authority to repeal such regulations. It employs a normative juridical research method using both the statutory approach and the conceptual approach by examining legislation, scholarly literature, and relevant legal theories.

The study finds that, from the perspective of the hierarchy of legal norms, ministerial regulations issued by restructured ministries remain legally recognized and continue to have binding legal force insofar as they are mandated by higher legislation or enacted pursuant to lawful authority. From the perspective of the validity of legal norms, such ministerial regulations remain in force unless and until they are repealed, amended, replaced, or declared invalid by competent legislation or an authorized judicial decision.

Where a ministry is dissolved and its functions are transferred to a newly established ministry, the authority to repeal the previous ministerial regulations rests with the successor ministry that assumes those functions. Conversely, where a dissolved ministry's functions are transferred to a government agency (Badan), the authority to repeal the former ministerial regulations rests with the agency that assumes the transferred functions, provided that the agency is directly under and accountable to the President.

This study proposes an amendment to Law Number 12 of 2011 on Lawmaking by introducing explicit provisions governing the repeal of regulations issued by ministries affected by institutional restructuring. Specifically, it recommends incorporating a general mechanism within Presidential Regulations governing the organization, duties, and functions of government institutions, whereby the formal repeal of obsolete ministerial regulations is carried out through Presidential Regulations, while regulations issued by the head of the successor agency function solely as implementing regulatory instruments within the scope of the new agency's statutory authority.

Keywords: Ministerial Restructuring, Authority, Ministerial Regulations

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'aalamiin, puji sukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatla sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Anter Venus, MA.Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak Dr. Suherman S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta beserta para Wakil Dekan.
3. Bapak Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang telah banyak mengarahkan penulis dalam hal kajian Ilmu Hukum maupun dalam mengarahkan penulis dalam proses administrasi pengajuan usulan Penelitian.
4. Bapak Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Irsyaf Marsal, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, juga tambahan referensi serta ilmunya dan dengan penuh sabar dan penuh perhatian dalam penulisan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu tersayang yang selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk putra bungsunya. Semoga Allah SWT selalu mengijabah doa

Bapak dan Ibu tersayang.

7. Sintya, istri tersayang yang selalu mendukung dan memotivasi suami tercinta.
8. Ibu Mila Novita, selaku pimpinan yang memberikan izin dan arahan bagi saya untuk melanjutkan pendidikan saya.
9. Mba Erlenih, teman seperjuangan CPNS yang mengajak untuk lanjut S2 dan berbagi informasi beasiswa.
10. Mas Darus Hadi Anggara, sahabat yang selalu memberi motivasi dan tempat diskusi berbagai hal.
11. Mas Haris, Febri, Fandi, Risma, dan Rizka, teman seperjuangan yang saling memotivasi dan membantu dalam menjalani perkuliahan S2.
12. Teman-teman S2 Magister Hukum angkatan 2024, khususnya kelas A1 dan kelas Hukum ketatanegaraan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang penulis buat baik sengaja maupun tidak disengaja selama berkuliah di Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. maupun selama penulisan Tesis ini. Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan dan menunjukkan jalan yang lurus dan benar kepada kita semua. Amin

Jakarta, 04 Juni 2026

Penulis

Rizki Bima Anggara

DAFTAR ISI

TESIS	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Toeritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Kajian Teoritis	19
1. Teori Kewenangan	19
2. Teori Kewenangan Organ Negara	29
3. Teori Hierarki Norma	31
4. Teori Kepastian Hukum	35
B. Kerangka Pikir.....	40

C. Definisi Operasional	42
BAB III	44
METODE PENELITIAN	44
1. Bahan Hukum Primer.....	46
2. Bahan Hukum Sekunder	46
3. Bahan Hukum Non–Hukum.....	47
BAB IV	49
HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Bagaimana Kedudukan Peraturan Menteri Yang Diterbitkan Oleh Menteri Yang Lama Sebelum Terjadi Perubahan Struktur Kementerian?	49
B. Siapa yang Berwenang Secara Konstitusional Untuk Mencabut Peraturan Menteri Tersebut Pasca Restrukturisasi Kementerian?	67
BAB V	93
PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Pembanding I.....	9
Tabel 1.2. Data Pembanding II.....	11
Tabel 1.3. Data Pembanding III.....	13
Tabel 1.4. Data Pembanding IV.....	15
Tabel 1.5. Data Pembanding V.....	17
Tabel 1.6. Perubahan Bentuk Kementerian Terdampak Restrukturisasi.....	76
Tabel 1.7. Perbedaan Kementerian dan Badan	81